

## PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP KINERJA PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI PEMODERATING

Aprianto L. Kuddy<sup>1</sup>

[kuddy.keuda@gmail.com](mailto:kuddy.keuda@gmail.com)

**Abstract:** Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kualitas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel pemoderasi yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran dan variabel dependennya adalah pengawasan keuangan daerah (APBD). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota dewan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, DPRD Kabupaten Jayapura, dan DPRD Kota Jayapura untuk periode 2009-2014 dengan jumlah responden, yaitu sebanyak 111 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei langsung, kemudian pengujian hipotesis diuji secara empiris dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Di samping itu, penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa interaksi antara gaya kepemimpinan dengan pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan.

**Keywords :** Gaya kepemimpinan, Pengetahuan anggaran, dan Kinerja Pengawasan keuangan daerah

### PENDAHULUAN

Bergulirnya gelombang reformasi diiringi pula dengan bergulirnya agenda desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Penyelenggaraan desentralisasi keuangan dan otonomi daerah diikuti dengan adanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah yang diikuti pula adanya pelimpahan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelimpahan dana ini diiringi dengan dilaksanakannya reformasi anggaran daerah (*budgeting reform*), namun yang terpenting adalah reformasi penganggaran yang terjadi diikuti pula dengan tuntutan agar diselenggarakannya paradigma baru dalam penyusunan anggaran yang mengedepankan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi anggaran sebagai pilar-pilar utama di dalam penyelenggaraan *good governance*, di samping anggaran juga harus dikelola melalui pendekatan *performance oriented, value for money*, keadilan, kesejahteraan, dan disiplin anggaran.

Pelaksanaan *budgeting reform* akan sukses bila ditopang dengan sarana pengawasan pengelolaan anggaran secara optimal (Freeman *et al.*, 2003 dan Tuasikal, 2007). Hal ini ditegaskan Terry dan Rue (2003:232) bahwa kuatnya pengawasan tentu akan menjadi hal yang sangat penting dan mutlak dilaksanakan di daerah, karena di dalam pengawasan anggaran akan terdapat jaminan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah dapat benar-benar berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan riil masyarakat di daerah serta dapat dipertanggungjawabkan. Pandangan Amiq (2010:10) bahwa esensi pengelolaan APBD sebagai dasar utama penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan berhasil tanpa disertai sistem pengawasan (*toezicht*) yang kuat.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai salah satu institusi yang paling memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan pengawasan APBD yang dikelola eksekutif (Syahrudin dan Taifur, 2002). Hal tersebut menjadi semakin meningkat karena hubungan antara legislatif dan eksekutif di daerah telah sama-sama memiliki *power*, yaitu bersifat sejajar dan menjadi mitra. James (1985:125) mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah keuangan milik rakyat dan tidak ada penggunaan uang rakyat tanpa pengawasan dari rakyat. Dalam hal ini, DPRD merupakan representasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan fungsi utamanya adalah menjalankan fungsi pengawasan, selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan dari berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh eksekutif, termasuk juga dengan pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan APBD (Basri, 2008). Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan, serta tujuan yang telah ditetapkan (Tarigan, 2002:147). Dengan demikian, tujuan pengawasan anggaran (APBD) adalah untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar telah dijalankan sesuai dengan yang telah digariskan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengawasan DPRD, maka eksekutif selaku pelaksana kebijakan di daerah akan terhindar dari berbagai penyimpangan anggaran, karena salah satu fokus utama pengawasan anggaran tidak hanya sebatas pada melihat sesuatu

dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi anggaran, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan atas berbagai penyimpangan-penyimpangan anggaran yang kapan saja dapat terjadi (Siegel, 1989:75). Apabila DPRD tidak dapat berfungsi dengan baik dalam menjalankan peranannya sebagai pengawas anggaran daerah, tentunya akan membuka peluang yang besar bagi eksekutif untuk lebih leluasa melakukan penyalahgunaan kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan yang diamanatkan, khususnya dalam pengelolaan APBD (Handyaningrat 1985:143; Shield *et al.*, 1998:67; Darwis, 2008).

Pengawasan APBD dapat dilakukan dengan baik bila anggota dewan selaku pengawas mempunyai pengetahuan yang memadai tentang anggaran (Herbert *et al.* 1984:3; Newkirk, 1986:23; Peterson, 1994:55; Chong dan Chong, 2002; Yuen, 2007; serta Basri, 2008). Asumsinya, bagaimana mungkin seorang anggota dewan dapat memberikan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan telah berjalan dengan baik apabila anggota dewan tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang keseluruhan struktur, prosedur, dan mekanisme penyusunan anggaran, tidak menguasai undang-undang dan kebijakan-kebijakan anggaran, terutama tidak memiliki kemampuan dalam mendeteksi terjadinya kegagalan anggaran. Yudono (2002) dan Mardiasmo (2003) menegaskan bahwa setidaknya pengetahuan yang akan dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Dewan harus mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai anggaran, karena semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan APBD (Erlina, 2008). Apabila pengetahuan tentang anggaran lemah, maka dewan hanya pasif dan menerima rancangan usulan APBD yang diajukan oleh eksekutif tanpa berupaya menelaah dan menelusuri bahwa anggaran yang diajukan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan rencana strategi daerah, sehingga pada akhirnya tidak mampu mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran (Darwis, 2008). Faktanya, sejauh ini masih banyak anggota dewan di daerah yang bingung membedakan terminologi antara pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan, di samping bahwa pengetahuan mereka mengenai keseluruhan struktur, prosedur, mekanisme, dan kebijakan-kebijakan anggaran belum sepenuhnya memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pengetahuan dewan mengenai anggaran di daerah dalam rangka pengawasan APBD masih lemah.

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan masalah kualitas anggota dewan, yaitu menilik pada hasil temuan Panitia Pengawas Pemilu Papua tahun 2004 yang mengungkapkan terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh partai-partai politik saat melakukan verifikasi calon legislatif (Mampioper, 2009). Dalam hal ini terbukti sejumlah calon legislatif yang berijazah palsu dan berbekal ujian persamaan sebagai persyaratan menjadi calon anggota legislatif. Hal ini mengindikasikan bahwa partai politik dalam pemilihan anggota untuk bakal calon anggota dewan belum sepenuhnya mengedepankan kualitas SDM, sehingga pada akhirnya telah menumbuhkan persepsi negatif di masyarakat mengenai kualitas dari anggota dewan. Abdullah dan Asmara (2006) meneliti perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah, salah satu hasil penelitiannya menyatakan bahwa APBD digunakan oleh legislatif sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan golongan.

Kelemahan yang terjadi atas peranan DPRD dalam pengawasan pengelolaan APBD dapat mungkin terjadi karena lemahnya aspek kepemimpinan pada lembaga DPRD sebagai salah satu kunci utama yang turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi, di samping bahwa penerapan gaya kepemimpinan yang baik juga merupakan faktor penentu akan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2009 dan Stoner, 1996). Senge (1990); Swieringa (1992); Alberto (2005) dalam Trisnarningsih (2007); Hugo (2009) yang meneliti pengaruh gaya kepemimpinan dalam konteks sistem penganggaran, menemukan bahwa penerapan gaya kepemimpinan yang baik dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja, selain mampu memberikan kontribusi positif terhadap dorongan peningkatan pengetahuan anggota melalui *learning organization*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peranan DPRD sangat besar dan memiliki nilai strategis dalam pengawasan APBD terutama apabila didukung dengan kualitas sumber daya manusia lembaga DPRD berupa pengetahuan anggaran yang memadai serta penyelenggaraan prinsip-prinsip *good governance* yang mengedepankan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan penerapan gaya kepemimpinan yang baik. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji secara empiris apakah pengetahuan dewan tentang anggaran dapat memengaruhi pengawasan APBD dan apakah gaya kepemimpinan sebagai variabel pemoderasi dapat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD, yaitu dengan studi pada DPRD Provinsi Papua, DPRD Kabupaten Jayapura dan DPRD Kota Jayapura.

## LANDASAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, DAN KERANGKA PIKIR

### (a) Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan APBD ( $X_1$ )

Pengawasan APBD dapat dilakukan dengan baik apabila dewan mempunyai pengetahuan tentang anggaran yang memadai. Spilker (1995) mengungkapkan bahwa pengetahuan yang tinggi akan sangat menunjang kualitas hasil kerja, di samping mampu mengatasi kerumitan pekerjaan yang dihadapi seseorang. Menurut Tubbs (1992) bahwa,

.....dalam mendeteksi sebuah kesalahan, maka seorang yang berada dalam profesi apapun harus didukung dengan pengetahuan yang memadai tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi.

Penelitian Kennedy (1993) yang menganalisis interaksi pengetahuan dengan kualitas hasil kerja dan membuktikan bahwa pengetahuan dan kemampuan memecahkan masalah yang tinggi memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas hasil pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Yudono (2002) menyatakan bahwa,

DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif, serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang memadai dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dewan dalam melakukan pengawasan APBD salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa apabila semakin berkualitas pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota, maka kinerja organisasi/lembaga juga akan menjadi semakin berkualitas. Hal ini berarti, apabila semakin baik pengetahuan yang dimiliki anggota dewan tentang anggaran, maka kinerja pengawasannya akan semakin optimal. Sebaliknya jika pengetahuan tentang anggaran lemah, maka dewan hanya pasif dan menerima rancangan usulan APBD yang diajukan oleh eksekutif tanpa berupaya menelaah dan menelusuri bahwa anggaran yang diajukan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan rencana strategi daerah, sehingga pada akhirnya tidak dapat mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran. Oleh karena itu, hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

**Hipo. 1 :** Diduga, pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

### (b) Gaya Kepemimpinan dan Pengawasan APBD ( $X_2$ )

Kepemimpinan yang baik merupakan syarat mutlak terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam ruang lingkup pengawasan, Nawawi (1989:67) dan Fatchurrochman (2002) menegaskan bahwa,

keterlibatan aktif pemimpin organisasi publik dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sangat efektif untuk mengendalikan kegiatan aparat pemerintahan sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and strong government*).

Hal ini berarti bahwa aspek kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, Yudono (2002) menegaskan bahwa,

....DPRD akan memainkan peranannya di dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar tentang hak, tugas, dan wewenangnya serta mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan kualitas pengetahuan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.

Hal ini mengindikasikan bahwa peran sentral pengetahuan sebagai sumber keunggulan kompetitif, menuntut lembaga/ organisasi DPRD untuk turut mendorong terciptanya suatu organisasi pembelajar (*learning organization*) guna peningkatan kapasitas dan kualitas pengetahuan anggota dalam rangka pencapaian kinerja organisasi yang lebih tinggi. Komitmen pimpinan organisasi/lembaga DPRD sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembelajaran kepada para anggota, sehingga pengetahuan memadai dari para anggota dewan yang mendukung penerapan anggaran dapat tercipta, terutama dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengawasan APBD yang diamanatkan sebagai dasar pencapaian tujuan lembaga DPRD.

Menurut Sedarmayanti (2009:184), keberhasilan dari seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan organisasi bergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkan. Carver dan Sergiovanni (1969:158) menyatakan bahwa,

.....gaya kepemimpinan yang tepat adalah gaya kepemimpinan yang tinggi orientasi tugas dan orientasi hubungan manusia.

Gaya kepemimpinan yang tinggi orientasi tugas dan hubungan adalah perilaku pemimpin yang banyak mengalokasikan waktu untuk mengadakan perubahan dan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan/melayani kepada para anggotanya (Lantu, 2007:29). Salah satu karakteristik gaya kepemimpinan pelayan, yaitu memberikan kesempatan pengikut untuk terus belajar (*learning organization*), memberikan keteladanan, dan memberdayakan anggota (Laub, 1999:43). Pandangan Senge (1990:315), pemimpin model ini senantiasa berfikir akan pentingnya kualitas pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran bagi anggotanya, sehingga ia akan berperan sebagai perancang (*as designer*), sebagai pengasuh (*as steward*), dan sebagai guru (*as teacher*) bagi anggotanya dalam organisasi.

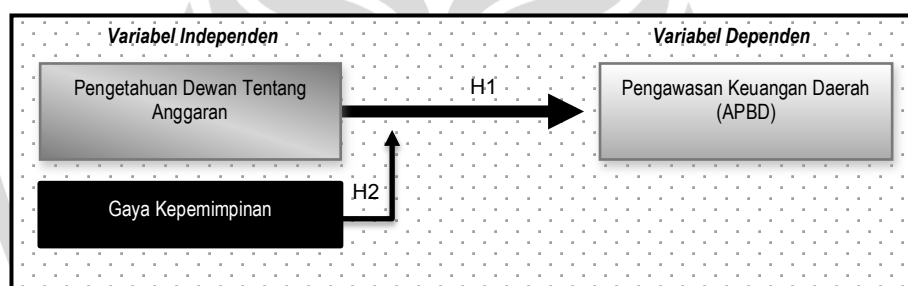
Brownell (1983); Senge (1990); Swieringa *et al.* (1992); Alberto (2005) dalam Trisnarningsih (2007) yang meneliti pengaruh gaya kepemimpinan dalam konteks sistem penganggaran, menemukan bahwa gaya kepemimpinan selain berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penganggaran, juga berpengaruh positif terhadap dorongan peningkatan pengetahuan anggota melalui *learning organization*.

Temuan-temuan tersebut di atas memberikan sinyal bagi penelitian ini bahwa variabel gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan lembaga DPRD pada setiap tingkatan organisasi terutama yang terkait pengelolaan anggaran akan menunjang pengetahuan dewan tentang anggaran secara memadai melalui *learning organisasi*, sekaligus akan memengaruhi efektivitas kinerja yang diemban anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan pada keseluruhan tahapan APBD. Oleh karena itu, hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

**Hipo. 2 : Diduga, semakin baik pengetahuan tentang anggaran dan gaya kepemimpinan, maka semakin tinggi pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan.**

Merujuk pada uraian landasan teori dan pengembangan hipotesis di atas, maka peneliti menyusun kerangka proses berfikir sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber, Data diolah Tahun 2013

## METODELOGI PENELITIAN

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif, serta metode yang digunakan adalah metode penelitian survei.

### 2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan pada kantor DPRD Provinsi Papua, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota Jayapura. Untuk responden anggota dewan, semua populasi dijadikan sebagai sampel.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket).

### 4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menguji 6 variabel, terdiri dari 1 variabel dependen, 1 variabel independen dan 4 variabel moderasi. Semua variabel dalam penelitian ini diukur berdasarkan teknik skala likert 5 angka (skor). Skor 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (RR= Ragu-Ragu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

#### 4.1. Variabel dependen: Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengawasan APBD adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD secara intensif pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) mengacu pada instrumen yang diadopsi dari penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang terdiri dari 12 butir pertanyaan. Variabel pengawasan APBD didasarkan pada item-item pertanyaan tentang pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD pada keseluruhan tahap APBD, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

#### 4.2. Variabel Independen: Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah pengetahuan anggota dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/A PBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan dan kebocoran anggaran. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan tentang anggaran mengacu pada instrumen yang diadopsi dari penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang terdiri dari 4 butir pertanyaan. Variabel pengetahuan tentang anggaran didasarkan pada item-item pertanyaan tentang pengetahuan dewan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD, pengetahuan pada saat melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan terhadap teknis atau alur penyusunan APBD.

#### 4.3. Variabel Moderasi: Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah strategi yang digunakan oleh para pimpinan pada setiap tingkatan lembaga sebagai proses memengaruhi anggotanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan, terutama dalam memperkuat fungsi kontrol atau pengawasan APBD. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan mengacu pada kuesioner penelitian oleh Engko dan Gudono (2007) yang terdiri dari 14 butir pertanyaan, kemudian peneliti kembangkan sesuai situasi dan teori terkait. Variabel gaya kepemimpinan didasarkan pada item-item pertanyaan tentang penerapan gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas dan gaya kepemimpinan yang berorientasi hubungan.

### 5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan rumusan hipotesis  $H_1$  sampai dengan  $H_5$ , maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda dan untuk menganalisis data, digunakan *software SPSS for window programe*. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_1.X_2 \varepsilon$$

<b>Keterangan:</b>	Y	: Pengawasan Keuangan daerah	X <sub>1</sub>	: Pengetahuan anggaran
	α	: Konstanta	X <sub>2</sub>	: Gaya Kepemimpinan
	β <sub>1</sub> , β <sub>2</sub>	: Koefisien regresi	X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub>	: Interaksi antara pengetahuan anggaran dan Gaya Kepemimpinan
			ε	: Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Demografi Responden

Data demografi berikut menyajikan beberapa informasi umum mengenai karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan latar belakang pendidikan.

Tabel 1. Karakteristik Responden dan Tingkat Respon Rate

Kelompok		Frekuensi	Persentase	Kelompok		Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	76 Orang	89,4%	Usia	31 – 40 Tahun	15 Orang	17,6%
	Wanita	9 Orang	10,6%		41 – 50 Tahun	53 Orang	62,4%
			100%		> 50 Tahun	17 Orang	20,0%
Jenjang Pendidikan	Strata 2 (S2)	15 Orang	17,6%	Latar Belakang Pendidikan	Ilmu sosial dan politik	6 Orang	7,1%
	Strata 1 (S1)	43 Orang	50,6%		Teknik	5 Orang	5,9%
	Diploma	3 Orang	3,5%		Ilmu agama	5 Orang	5,9%
	SMU	24 Orang	28,2%		Akuntansi	0 Orang	0,0%
			100%		Manajemen	21 Orang	24,7%
			Hukum		19 Orang	22,4%	
			Lainnya	29 Orang	34,1%		
					100%		

<b>Tingkat Pengembalian Kuesioner:</b>			
- Kuesioner yang didistribusikan	= 111	- Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	= 3
- Kuesioner yang tidak dikembalikan	= 23	- Kuesioner yang diolah	= 85
- Kuesioner yang kembali	= 88	- Respon rate	= 79,28%

Sumber: Sekretariat DPRD dan data diolah, Tahun 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 85 responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah, terdapat 76 orang diantaranya pria dan 9 orang di antaranya wanita dengan usia responden yang paling banyak berpartisipasi, yaitu antara 41 sampai 50 tahun dan rata-rata responden berjenjang pendidikan strata 1.

## 2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

### 2.1. Hasil Uji Validitas.

Hasil pengujian instrumen penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Confirmatory Factor Analysis

Variabel	KMO & BARLET TEST			Total Variance Explained		Rotate Component Matrix
	KMO	BTS Chi-square	Sig.	Component	Eigenvalue Loading	Total Component
Pengetahuan	0,623	187,638	0,000	4	65,655%	1
Kepemimpinan	0,706	609,869	0,000	14	69,949%	4
Pengawasan	0,781	374,386	0,000	12	62,188%	3

Sumber: Data primer diolah Tahun 2012

Berdasarkan hasil uji CFA di atas, nilai *Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adequacy (KMO-MSA)* terhadap variabel pengetahuan anggaran (4 item), gaya kepemimpinan (14 item), dan variabel pengawasan (12 item), menunjukkan bahwa semua item memiliki loading factor di atas 0,50 atau tidak ada yang dikeluarkan. Di samping itu, nilai *Bartlett's test of Sphericity* dengan *Chi-squares* signifikan pada 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa uji analisis faktor dapat dilanjutkan. Kemudian berdasarkan analisis faktor untuk masing-masing variabel, dapat diketahui bahwa dari rotasi komponen matriks analisis faktor menunjukkan bahwa tiap-tiap konstruk memiliki undimensionalitas atau dengan kata lain semua indikator yang digunakan memiliki faktor penjelas yang kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing skor butir pertanyaan adalah valid. Adapun hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan	0,824	Reliabel
Kepemimpinan	0,806	Reliabel
Pengawasan	0,786	Reliabel

Sumber: Data primer diolah Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji reliabilitas variabel atas 3 instrumen variabel penelitian menunjukkan *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) di atas 0,60. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut di atas, variabel-variabel yang akan diuji telah akurat dan konsisten, sehingga memenuhi syarat untuk dapat digunakan dalam analisis data.

## 3. Pengujian Asumsi Klasik

### 3.1. Uji Normalitas

Suatu persamaan regresi dapat dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov*, lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006:151). Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas

Statistik Uji	Nilai	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov Z	0,730	Normal
signifikansi	0,661	

Sumber: Data primer diolah Tahun 2012

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

### 3.3. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2005), untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, yaitu melalui uji Durbin-Watson. Syaratnya, nilai d-w lebih besar dari batas atas du dan kurang dari 4-du ( $du < d-w < 4-du$ ). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Autokorelasi

dl	du	4-du	4-dl	d-w	Keterangan
1,4221	1,8864	2,1136	2,5779	1,909	Non Autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai d-w berada di antara -2 dan 2+, yaitu dengan angka 1,909. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa nilai d-w lebih besar dari batas atas du dan kurang dari 4-du ( $du < d-w < 4-du$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

### 3.4. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2005:92), apabila nilai tolerance di atas 10% dan VIF di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan	0,503	1,990	Non Multikolinieritas
Kepemimpinan	0,482	2,075	Non Multikolinieritas

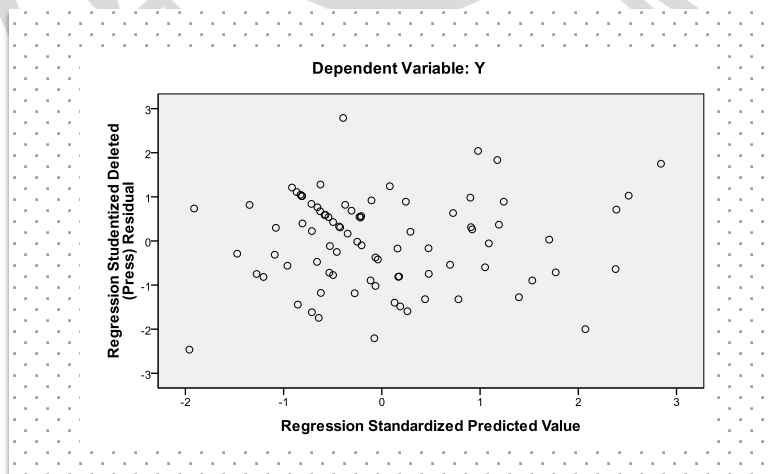
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2012

Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance  $< 0,10$ . Di samping itu, hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa kelima variabel independen memiliki nilai  $VIF > 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

### 3.5. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2006:126), jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2. Scatterplot



Berdasarkan gambar Scatterplot di atas, grafik menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi model.

#### 4. Pembuktian Hipotesis

Hasil regresi diuji secara statistik menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui signifikansi koefisien regresi dari masing-masing variabel independen untuk menjawab hipotesis yang diajukan ( $p$ -value). Tingkat keyakinan (*confident interval*) yang digunakan, yaitu sebesar 95% (tingkat kesalahan  $\alpha=5\%$ ), sehingga jika hasil penelitian menunjukkan taraf signifikansi ( $p$ -value) lebih kecil dari  $\alpha=5\%$  ( $p$ -value < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pembahasan hasil penelitian dapat disajikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel Dependen	Variabel Independen	Hipotesis	Koefisien Regresi	T Hitung	$p$ -value (Sig.)
Pengawasan (Y)	Pengetahuan ( $X_1$ )	$H_1$	0,740	5,356	0,000**
	Interaksi $X_1X_2$	$H_2$	1,056	4,267	0,000**
<b>Constant</b> = 6,845					
** Signifikan pada tingkat 1%					
* Signifikan pada tingkat 5%					
<b>Persamaan Regresi:</b> $Y = 6,845 + 0,740X_1 + 1,056(X_1X_2) + \epsilon$					
<b>Keterangan:</b> $X_1$ diukur berdasarkan pengetahuan menyusun RAPBD/APBD; identifikasi kegagalan APBD. $X_2$ diukur berdasarkan gaya kepemimpinan orientasi tugas dan orientasi hubungan manusia.					

Sumber : Data Diolah Tahun 2012

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang anggaran ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap variabel pengawasan APBD (Y). Pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai  $t_{hitung}$  dari ( $X_1$ ), yaitu sebesar 5,356 dengan taraf signifikansinya sebesar 0,000. Oleh karena itu, berdasarkan taraf signifikansi ( $\alpha$ )=5%,  $p$ -value 0.000 lebih kecil dari ( $\alpha$ )=5% (0.000<0.05) sehingga disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) dapat diterima. Di samping itu, hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0,740 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan pengetahuan anggaran ( $X_1$ ), maka pengawasan (Y) akan meningkat sebesar 0,740 satuan dengan menganggap variabel bebas yang lain konstan.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis kedua ( $H_2$ ) menunjukkan bahwa variabel interaksi pengetahuan anggaran dengan gaya kepemimpinan ( $X_1X_2$ ) berpengaruh terhadap pengawasan APBD (Y). Pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,267 dan taraf signifikansinya sebesar 0.000. Oleh karena itu, jika digunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )=5%,  $p$ -value 0.000 lebih kecil dari ( $\alpha$ )=5% (0.000<0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima. Di samping itu, hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi dari interaksi antara  $X_1$  dengan  $X_2$  ( $X_1X_2$ ) adalah positif 1,056 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan dari variabel ( $X_1X_2$ ), maka pengawasan (Y) akan meningkat sebesar 1,056 satuan dengan menganggap variabel bebas yang lain konstan.

#### 5. Pembahasan

##### 5.1. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Artinya, semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran, maka semakin meningkat pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan yang dimaksud adalah meliputi pengetahuan tentang penyusunan APBD, pengetahuan tentang pelaksanaan APBD, pengetahuan tentang identifikasi kebocoran, pemborosan/kegagalan pelaksanaan APBD, pengetahuan tentang teknis atau alur penyusunan APBD, serta pengetahuan tentang tahapan pengawasan yang dimulai dari penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran (APBD).

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indradi (2001); Syamsiar (2001); dan Sutarnoto (2002) yang menemukan bahwa kualitas anggota dewan yang diukur berdasarkan tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan yang salah satunya adalah kinerja pengawasan APBD. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003); Werimon *et al.* (2007); dan Coryanata (2007) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran yang merupakan salah satu unsur dari kualitas SDM berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Temuan ini juga mendukung teori-teori yang menyatakan bahwa pengetahuan yang tinggi akan sangat menunjang kualitas dari hasil pekerjaan (Tubbs, 1992; Kennedy, 1993; Spilker, 1995; Cloyd, 1997; Yuen, 2007). Namun, temuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Nasirwan (2008) yang menyatakan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD.



Apabila melihat kepada latar belakang pendidikan, hanya sebagian kecil anggota dewan yang menjadi sampel penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi. Namun, berdasarkan pengalaman yang dimiliki dan adanya berbagai pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota dewan, maka pengetahuan mereka tentang anggaran menjadi semakin baik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Indriantono dan Supomo (1999) yang menyebutkan bahwa kualitas pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. Artinya, pengetahuan yang tinggi akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya. Dengan demikian, melalui kualitas pendidikan dan pengalaman yang memadai tersebut, maka pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dalam rangka pengawasan atau fungsi *checks and balance* akan semakin meningkat.

## 5.2. Moderasi Gaya Kepemimpinan dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa interaksi gaya kepemimpinan dengan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap kinerja pengawasan APBD yang dilakukan anggota dewan. Artinya bahwa semakin baik penerapan gaya kepemimpinan pada setiap tingkatan kelembagaan DPRD dan diikuti pula dengan semakin tinggi kompetensi dewan berupa pengetahuan yang memadai tentang anggaran, maka kinerja pengawasan yang dilakukan oleh dewan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Brownell, 1983; Swieringa *et al.*, 1992; Hugo *et al.*, 2009) yang membuktikan bahwa gaya kepemimpinan *initiating structure* (orientasi tugas) dan *consideration* (orientasi hubungan manusia) memiliki efek positif terhadap dorongan peningkatan pengetahuan anggota melalui *learning* organisasi dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja. Dalam konteks ini lebih difokuskan pada kinerja pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh lembaga DPRD. Hasil temuan ini juga konsisten dengan teori kepemimpinan yang dikemukakan Senge (1990) bahwa pengetahuan yang tinggi dapat meningkatkan kualitas hasil pekerjaan apabila didukung dengan penerapan gaya kepemimpinan yang baik. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan dengan hasil penelitian oleh Amrul dan Nasir (2002) serta Sumarno (2005) yang menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak dapat memengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial.

Fakta empiris akan pentingnya penerapan gaya kepemimpinan yang baik dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan oleh anggota dewan, terbukti dari penilaian positif yang diberikan oleh sebagian besar sampel anggota dewan dalam penelitian ini, yaitu menyatakan bahwa pemimpin pada lembaga DPRD telah menerapkan gaya kepemimpinan orientasi tugas dan orientasi hubungan. Sehubungan dengan hal itu, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor politis berupa isu disintegrasi bangsa, tingginya krisis kepemimpinan di Papua serta kepentingan kedudukan dan jabatan diduga merupakan faktor dominan yang turut memengaruhi para pimpinan organisasi publik termasuk lembaga DPRD untuk mengoptimalkan peranan kepemimpinannya. Menyadari akan pentingnya aspek kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD khususnya kinerja pengawasan anggaran, maka implementasi gaya kepemimpinan yang baik pada lembaga DPRD turut diterapkan.

Apabila para pimpinan DPRD mampu mengarahkan lembaga DPRD pada kinerja pengawasan secara optimal, maka pimpinan DPRD dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan berupa reputasi yang lebih baik di masyarakat yang kemudian dimungkinkan untuk dapat terpilih kembali. Hal ini senada dengan aplikasi teori keagenan yang dikemukakan oleh Suwardjono (2005:485) bahwa untuk menciptakan kontrak kerja yang *fairness* antara agen (DPRD) dan prinsipal (rakyat), maka agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal, dan berdasarkan pelaksanaan kewajiban yang optimal kepada prinsipal, maka agen akan mendapatkan insentif/ yang memuaskan dari prinsipal.

## SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis, terdapat beberapa simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini.

- Penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD.
- Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap pengawasan APBD.
- Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan APBD.
- Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

- (e). Interaksi antara pengetahuan dewan tentang penganggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

## 2. Saran

Terdapat saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi guna pengembangan penelitian sejenis di masa datang.

- (a). Bagi Penelitian selanjutnya agar jumlah sampel dapat diperluas ke anggota dewan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten dalam skala satu provinsi sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasi.
- (b). Pada saat pengambilan sampel, penelitian selanjutnya hendaknya memilih sampel anggota dewan yang secara khusus membidangi anggaran.
- (c). Peneliti selanjutnya perlu mempertimbangkan variabel kontinjensi lainnya, terutama yang diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan John Andra Asmara. 2006. Perilaku Opportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang*.
- Basri, Yesi Mutia. 2008. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran pada pengawasan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 8, nomor 1.
- Ceicilia Engko dan Gudono. 2007. Pengaruh Kompleksitas Tugas dan Locus of Control terhadap Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Auditor, *Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar*.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar*.
- Fatchurrohman, Agam. 2002. *Manajemen Keuangan Publik*, Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Corruption Watch, 23-25 Januari 2002, Jakarta.
- Gede, Putu. Penyelidikan Dugaan Korupsi Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura. (Online) <http://www.kbr68h.com/> (diakses 30 September 2011)
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hugo, Zagorsek. 2009. Transactional and Transformational Leadership Impacts on Organizational Learning. *JEEMS*, Vol. 2. pp.145-165.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Seminar pada Sekretariat Good Public Governance. BAPPENAS. Jakarta.
- Kuddy, A. L. A. (2012). *Gaya Kepemimpinan, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)* (Doctoral dissertation, Tesis. Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Brawijaya Malang).
- Kuddy, A. L. (2017). Type of Leaderships, Accountability, Public Participation and Transparency of Public Policy as moderation to Degree of Legislative's Members Budgeting Knowledge in Controlling the Regional Budget (APBD). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 1(3).
- Mampioer, Dominggus. 2009. Kualitas Caleg dan Pemilu 2009-2014 di Papua. (Online) <http://tabloidjubi.com/index.php> (diakses 7 September 2012).
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Publisher, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara. *Majalah Media Akuntansi*, Edisi No. 39.
- Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, lilik, 2010. Determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD. *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto*.
- Rosseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. *Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya*.
- Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2007. *Pengaruh Akuntabilitas Publik Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. *UMM Scientific Journal*, ejournal.umm.ac.id. (diakses pada tanggal 5 Maret 2012).
- Werimon, Simson., Ghozali, Imam dan Nazir, Mohamad. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Public Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Yudono, Bambang. 2002. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela.3.htm>. (diakses pada tanggal 5 Maret 2012).